

**GAMBARAN PERAN PEREMPUAN DALAM RUBRIK  
PROFIL MAJALAH *FEMINA* PADA MASA ORDE BARU DAN  
REFORMASI (1972-2010)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**SILVIA ERINA**  
**2006/73593**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS

UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada tanggal 5 Agustus 2011

Gambaran Peran Perempuan dalam Rubrik Profil  
Majalah *Femina* pada Masa Orde Baru dan Reformasi  
(1972-2010)

Nama : Silvia Erina  
BP/ NIM : 2006/73593  
Jurusan : Sejarah  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2011

Tim Penguji

Ketua : Hendra Naldi, S.S, M.Hum  
Sekretaris : Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si  
Anggota : 1. Prof. Dr. Mestika Zed, M.A  
2. Drs. Etmi Hardi, M.Hum  
3. Abdul Salam, S.Ag, M.Hum

Tanda Tangan

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

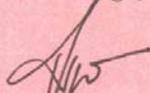
**Gambaran Peran Perempuan dalam Rubrik Profil  
Majalah *Femina* pada Masa Orde Baru dan Reformasi  
(1972-2010)**

Nama : Silvia Erina  
BP/NIM : 2006/73593  
Jurusan : Sejarah  
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Padang, Agustus 2011

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I,**



Hendra Naldi, S.S, M.Hum  
NIP. 196909301996031001

**Pembimbing II,**

Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si  
NIP. 197312022005011001

**Ketua Jurusan**



Hendra Naldi, S.S, M.Hum  
NIP. 196909301996031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Erina  
NIM/BP : 73593/2006  
Prodi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya dan pemikiran saya sendiri. Bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Padang, Agustus 2011



Silvia Erina

## ABSTRAK

**Silvia Erina (06/73593): Gambaran Peran Perempuan dalam Rubrik Profil Majalah *Femina* pada Masa Orde Baru dan Reformasi (1972-2010). Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2011**

Perubahan peran perempuan dapat kita lihat dari rubrik profil yang diangkat dalam majalah perempuan seperti *Femina*. Karena majalah merupakan refleksi dari masyarakat dan zamannya. Serta perubahan tersebut akan dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka dengan begitu akan terlihatlah bagaimana gambaran peran perempuan di ranah domestik dan publik dalam rubrik profil *Femina* pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode analisis isi. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, pertama, mencari dan mengumpulkan data berupa majalah, buku-buku atau tulisan-tulisan relevan dengan kajian yang dilakukan melalui studi pustaka. Kedua, tahap analisis dan interpretasi yaitu karya-karya yang diteliti tersebut diuraikan dan diterangkan berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, penyusunan dan penyajian data-data yang telah ditemukan tadi dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa, gambaran peran perempuan kelas menengah atas pada masa Orde Baru dan Reformasi yang dilihat dari tahun 1972 sampai 2010, mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang. Periode 1970-an perempuan lebih mengutamakan mengurus keluarga dari pada kegiatan yang lainnya, sehingga mereka rela berhenti kuliah dan bekerja karena telah berkeluarga. Bahkan mereka menikah kebanyakan pada usia muda. Dalam bidang politik dan hukum belum banyak perempuan yang aktif, serta dalam organisasi perempuan dibentuk dan di kontrol oleh pemerintah. Pakaian yang populer masa ini adalah berpakaian kebaya dan batik.

Tahun 1980-an peran perempuan mengalami perkembangan karena telah mulai mencuatnya perempuan dalam ranah publik terutama dalam bidang pendidikan dan menjadi perempuan karier. Peran dalam perpolitikan juga mengalami perkembangannya. Kemudian organisasi perempuan juga sudah mengarah pada pembela terhadap masalah perempuan. Tetapi tetap saja berada dalam kontrol pemerintah. Mode pakaian yang trend pada masa ini yaitu pakaian jadi bahkan dengan citra Internasional. Perempuan terus mengalami perubahan peran di tahun 1990-an. Karena perempuan telah banyak yang sukses menjadi perempuan karier. Serta kemajuan dalam bidang pendidikan dan berorganisasi juga terjadi. Trend pakaian masa ini yaitu minimalis yang serba ringkas. Tahun 2000-an merupakan titik awal bagi perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang. Karena pemerintah telah menjamin kesetaraan, sehingga terlihatlah perkembangan

yang dialami perempuan dalam ranah publik. Trend pakaian masa ini yaitu pakaian yang terlihat modis dan elegan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat sekarang ini tentu tidak asing lagi dengan namanya majalah. Majalah sudah beredar dimana-mana dan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga tampil dengan beragam jenis dan coraknya.

Majalah hadir di Indonesia sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda. Walaupun pembagian pers yang termasuk dalam majalah, baru ada setelah Indonesia merdeka. Jadi yang dikatakan sebagai majalah itu sendiri adalah sebuah penerbitan berkala, terbit secara teratur dan sifat isinya tidak menampilkan pemberitaan atau sari berita, melainkan berupa artikel, atau bersifat pembahasan yang menyeluruh dan mendalam, maka semua penerbitan pers sebelum tahun 1950-an dapat di golongankan sebagai majalah. Karena masa itu, hampir semua surat kabar berbentuk seperti tabloid yang kita kenal sekarang.<sup>1</sup>

Majalah pada abad ke 19 hanya diterbitkan oleh keturunan Indo-Belanda dan majalah pertama yang diterbitkannya bernama *Bondsblad* yang dirilis oleh perkumpulan kaum Indo-Belanda. Tetapi dengan adanya politik etis di awal abad ke 20, maka mulailah banyak terbit majalah-majalah yang dirilis oleh masyarakat pribumi Indonesia. Hal ini disebabkan karena telah banyaknya lahir pemuda-pemuda cendekiawan Indonesia yang ingin mewujudkan kemerdekaan, sehingga

---

<sup>1</sup> Kurniawan, Junaedhie, *Rahasia Dapur Majalah Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 1995, Hal xiii

lahirlah organisasi yang didorong oleh gagasan kemerdekaan itu dan untuk menyebarkan suara mereka, maka di perlukanlanlah majalah sebagai alat pergerakannya. Majalah pertama yang diterbitkan oleh pergerakan adalah majalah *Retno Doemilah* oleh *Organisasi Boedi Oetomo* pada tahun 1904.<sup>2</sup>

Walaupun pada awal abad ke 20 sampai awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 majalah di Indonesia hanya ada majalah politik, niaga, dan sastra. Tetapi setelah tahun 1948 dan sampai sekarang dengan terus berkembangnya zaman, majalah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Hal ini dapat kita lihat dari terbitnya berbagai macam jenis dari majalah tersebut seperti: majalah sastra dan budaya, majalah hiburan, majalah perempuan, majalah remaja, majalah berita, majalah keluarga, majalah khusus, majalah musik, majalah olah raga, majalah ekonomi, dan lain-lain. Isi dari majalah tersebut juga akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Karena majalah juga merupakan refleksi dari masyarakat atau keadaan zamannya.<sup>3</sup>

Majalah yang merupakan refleksi dari masyarakat dan zamannya, maka isi dari majalah itu tentu terikat oleh ikatan waktu atau jiwa zamannya, karena tiap zaman memantulkan jiwa kesatuan sosial. Jadi gambaran tentang masyarakat atau zaman pada periode tertentu dapat kita lihat dengan hal-hal yang dibahas dalam suatu majalah pada periode tertentu pula.

Majalah perempuan yang terbit akan dipengaruhi oleh ikatan waktu dan zamannya. Begitu pula dengan majalah perempuan yang terbit pada masa Orde

---

<sup>2</sup> *Ibid* 1.Hal. xvii

<sup>3</sup> *Op.cit (italic)*

Baru tentu memiliki perbedaan dengan majalah perempuan yang terbit pada masa Reformasi karena jiwa zamannya telah berbeda.

Perubahan yang terjadi pada majalah perempuan yang terbit pada masa Orde Baru dan Reformasi tentu di pengaruhi oleh perubahan yang juga terjadi pada perempuan pada masa tersebut. Karena majalah tersebut membahas segala hal yang berhubungan dengan perempuan, kemudian perubahan yang terjadi itu tidak bisa kita bahas dengan hanya melihat dulu dan sekarang. Tetapi perubahan itu harus kita lihat berdasarkan perubahan yang terjadi dalam konteks perubahan sosial.

Hal ini sesuai dengan perkataan dari Taufik Abdullah dalam buku *Menjurus Arus*:

Kalau saja saya boleh mengalihkan titik tolak perumusan masalah, maka saya pun mengatakan bahwa selagi cara kita melihat sejarah masih bercorak androsentris, kita pun tidak akan dapat memahami perubahan struktural yang dialami masyarakat kita. Pendekatan yang androsentris bukan saja meniadakan kehadiran perempuan dalam sejarah, tetapi juga menguburkan pandangan dan pemahaman terhadap dinamika masyarakat sendiri. Maka, begitulah pula halnya turun-naiknya kehadiran perempuan dalam percaturan sosial politik dan besar kecilnya peranan sosial-kultural perempuan tidak bisa di ukur hanya dari perbandingan dulu dan sekarang, tetapi harus juga dipahami dalam konteks perubahan sosial yang terjadi.<sup>4</sup>

Perubahan tersebut dapat kita lihat dari perubahan yang terjadi dalam bidang sosial budaya, politik, pendidikan, ekonomi, organisasi dan hukum, serta mode berpakaian yang terjadi pada perempuan Indonesia dari masa Orde Baru sampai Reformasi.

---

<sup>4</sup>Taufik, Abdullah, *Soalnya Bukan Sekedar Dulu dan Sekarang* (dalam Buku *Menjurus Arus*, Jakarta, PT Gaya Favorit Press, 1997, Hal 36

Perubahan sosial budaya, dapat di lihat dari budaya patriarki yang selama ini di pakai pemerintahan Orde Baru sebagai ideologi Negara yang membuat perempuan di marginalkan perannya baik di ranah domestik maupun publik. Hal ini dapat di goyahkan oleh perempuan, dengan masuknya feminisme ke Indonesia pada tahun 1980, kemudian mengalami perkembangan ke arah kesadaran gender pada tahun 1990-an karena perempuan menginginkan terwujudnya kesetaraan gender. Sehingga pada masa Reformasi merupakan tahap selanjutnya perkembangan dari kesadaran gender yang telah terjadi di tahun 1990-an. Maka perempuan terus mengalami perkembangan terhadap peran perempuan baik di ranah domestik maupun publik, karena pemerintah telah menjamin kesetaraan tersebut yang di cantumkan dalam GBHN.

Perubahan politik yang terjadi pada masa Orde baru dan Reformasi terhadap perempuan dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tersebut memberikan peran kepada perempuan. Masa Orde Baru perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki sehingga tidak adanya kesetaraan gender.<sup>5</sup> Karena pemerintah selalu mengendalikan perempuan dalam berbagai bidang., sedangkan pada masa Reformasi pemerintah telah menjamin kebebasan gender antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam GBHN 1999 yang berisikan: Pemerintah dalam mengarahkan pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan dua penekanan. Pertama, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan

---

<sup>5</sup> Hamid, Arifin, *Representasi Perempuan Dalam Pers*, dalam Jurnal Komunikasi Massa Vol 1, Juli 2007, Hal 8-7 (<http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sk> 11 Hamid Arifin, pdfs)

gender. Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.<sup>6</sup>

Perubahan perempuan tidak hanya terjadi dalam bidang politik, tetapi juga mengalami peningkatan dalam bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan, budaya ekonomi, hukum, serta dalam mode berpakaian. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk menulis tentang bagaimana gambaran perempuan yang diangkat oleh majalah perempuan pada pada masa Orde Baru dan Reformasi. Oleh karena itu penulis ingin meneliti salah satu majalah perempuan yang ada di Indonesia yaitu majalah *Femina*. Penulis ingin meneliti majalah *Femina* ini karena merupakan majalah pelopor pertama sebagai lambang dari kemajuan majalah perempuan. Karena majalah pra 1972 terlalu banyak didominasi oleh majalah hiburan, sementara majalah perempuannya terlalu didaktis dan kaku.<sup>7</sup>

*Femina* ini juga menarik diteliti karena, penulis dapat melihat bagaimana gambaran perempuan yang diangkat oleh *Femina* pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Karena rubrik-rubrik yang diangkat dalam majalah ini dapat mewakili bagaimana sosok perempuan pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Karena majalah ini terbit tiap minggu, tentu hal-hal yang menarik dan penting akan ditampilkan dengan nuansa yang berbeda tiap minggunya. Penulis ingin meneliti tentang salah satu rubrik saja yang ada dalam majalah ini, yaitu

---

<sup>6</sup> Siti Musdah M, *Perempuan dan Politik*, Jakarta, PT Gramedia Utama, Hal 101-102

<sup>7</sup>*Op.cit (italic)* Hal 75

tentang rubrik “Profil”. Menurut KBBI (1997) profil adalah sebuah pokok pikiran yang ditafsirkan serta jelas atau sekumpulan data yang menggambarkan ciri-ciri penting dari sesuatu yang dibuat atau disampaikan.

Jadi dengan demikian tokoh-tokoh yang diangkat dalam rubrik profil dalam majalah tentulah merupakan profil tokoh-tokoh yang dianggap penting untuk di angkat bagi para pembacanya. Serta penulisannya disesuaikan menurut perkembangan zaman.

Topik yang diangkat dalam rubrik Profil *Femina* pada masa Orde Baru sampai sekarang akan terlihat perubahan dari penulisan masalah yang dibahas. Karena pengaruh dari perubahan tatanan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik dan hukum, yang terjadi pada perempuan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tentang gambaran perempuan yang ada dalam rubrik Profil *Femina*. Karena melalui rubrik Profil yang ada dalam *Femina* tersebut, penulis ingin melihat bagaimana jiwa zaman atau perubahan sosial Orde Baru dan Reformasi yang mempengaruhi penulisan Profil yang diangkat dalam majalah tersebut.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang majalah perempuan yang ada di Indonesia. Untuk lebih mempermudah dan terfokusnya pembahasan dalam penelitian maka perlu dibuat batasan masalah dari segi temporalnya yaitu dari tahun 1972 sampai 2010. Tahun 1972 merupakan awal terbitnya *Femina* dan merupakan majalah pelopor pertama sebagai lambang dari

kemajuan majalah perempuan. Karena majalah pra 1972 terlalu banyak didominasi oleh majalah hiburan, sementara majalah perempuannya terlalu didaktis dan kaku. Kemudian majalah ini juga masih eksis sampai sekarang.

Jadi disini penulis ingin melihat gambaran perempuan yang ada dalam majalah perempuan yang terbit di Indonesia dalam dua periode yaitu pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Karena begitu banyaknya majalah perempuan yang terbit di Indonesia, maka penulis hanya mengambil salah satu majalah perempuan yang sudah lama terbit di Indonesia dan masih bertahan dan terkenal sampai sekarang yaitu *Femina*.

Dalam majalah ini begitu banyak bagian dari rubriknya maka untuk lebih memudahkan penelitian, penulis hanya meneliti satu rubrik saja dari *Femina* yaitu rubrik Profil. Karena melalui rubrik Profil yang ada dalam *Femina* tersebut, penulis ingin melihat bagaimana jiwa zaman dan perubahan sosial Orde Baru dan Reformasi yang mempengaruhi penulisan profil yang diangkat dalam majalah tersebut.

Berdasarkan uraian penulis sajikan di atas, maka untuk lebih terfokusnya penelitian ini maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana gambaran peran perempuan di ranah domestik dan publik dalam rubrik Profil majalah *Femina* pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang majalah perempuan *Femina* pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

Mendeskripsikan bagaimana gambaran peran perempuan di ranah domestik dan publik dalam rubrik Profil majalah *Femina* pada masa pemeritahan Orde Baru dan Reformasi.

Manfaat penelitian ini sendiri yaitu bermanfaat sebagai:

- a. Menambah reverensi sejarah khususnya sejarah pers dan sejarah perempuan.
- b. Sebagai bahan informasi tentang perubahan gambaran peran perempuan di ranah domestik dan publik dalam rubrik profil majalah *Femina* pada masa Orde Baru dan Reformasi.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### 1. Studi Relevan

Tulisan mengenai majalah perempuan ini sudah banyak ditulis. Tetapi tulisan mengenai majalah *Femina* tentang gambaran perempuan dalam rubrik Profil yang ada dalam majalah *Femina* dari tahun 1972 sampai 2010, sepengetahuan penulis belum ada yang membutnya. Tulisan yang relevan dengan penulisan ini adalah

Tulisan Agus Rakasiwi tentang Menengok Citra Perempuan dari Sampul Majalah. Dia mencoba menjelaskan tentang citra cantiknya seorang perempuan di Indonesia pun bisa dilihat dari perjalanan sebuah sampul majalah perempuan ternama di Indonesia. Sejak periode 1970-an sampai dengan periode tahun 2000-an, model perempuan di sampul majalah itu seolah menjadi rujukan tentang definisi "cantik".<sup>8</sup>

Tulisan Hamid Arifin dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam Jurnal Komunikasi Massa Vol. 1, Juli 2007, 8-7 tentang Representasi Perempuan dalam Pers. Dia menjelaskan tentang bagaimana ideologi gender yang sudah sangat berakar di Indonesia turut mempengaruhi kehidupan pers. Sehingga terjadinya pers bias gender.<sup>9</sup>

Selain itu tulisan Martadi dari Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain-Universitas Kristen Petra tentang Citra Perempuan dalam Iklan Femina Edisi 1999. Dia menjelaskan tentang citra seorang perempuan dalam iklan tersebut bahwa citra perempuan sebagai pengurus utama rumah tangga, sebagai pengurus utama keluarga, sebagai pengemban tugas-tugas dapur, selalu ingin tampil memikat, selalu harus mengikuti pergaulan, sebagai obyek penyenang laki-laki.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Agus, Rakasiwi, *Menengok Citra Perempuan dari Sampul Majalah*, (agus.rakasiwikampuspr@yahoo.com 14 Jan 2010)

<sup>9</sup> Hamid, Arifin, *Representasi Perempuan dalam Pers*, dalam Jurnal Komunikasi Massa Vol 1, Juli 2007, Hal 8-7, (<http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sk11HamidArifin.pdf>)

<sup>10</sup> Martadi, *Citra Perempuan dalam Iklan Femina Edisi 1999*, (<http://puslit2.petro.ac.id/journal/index.php/>)

Tulisan-tulisan lain yang juga relevan dengan pokok-pokok permasalahan adalah buku tentang pers yaitu tulisan Kurniawan Junaedhie tentang Rahasia Dapur Majalah. Buku ini menjelaskan tentang awal terbit sampai berkembangnya berbagai majalah yang ada di Indonesia semenjak masa kolonial sampai Orde Baru.

Tulisan I. Taufik tentang sejarah perkembangan pers di Indonesia. menjelaskan tentang sejarah perkembangan pers serta bagaimana peranan pers yang terbit pada masa kolonial sampai Orde Baru. Tulisan pengurus PWI pusat tentang Wanita dan Pers. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana peranan perempuan dalam pembangunan pada masa Orde Baru.

## 2. Kerangka Konseptual

Pers dalam pengertiannya dapat dibagi dalam dua pengertian yaitu pers dalam arti umum dan pers dalam arti khusus. Pers dalam arti umum adalah semua media yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam bahasan ini termasuk surat kabar, radio, televisi dan film.<sup>11</sup> Sebaliknya pengertian pers yang lebih khusus adalah alat komunikasi dalam bentuk media cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid dan buletin.<sup>12</sup> Jadi majalah merupakan bagian dari pengertian pers secara khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan majalah itu sendiri adalah :

- a) Media cetak yang terbit secara berkala, tetapi bukan yang terbit setiap hari.

---

<sup>11</sup> Teguh Meinenda, *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik*, Bandung, Armico, 1981, Hal 40

<sup>12</sup> *Ibid* 8

- b) Media cetak itu bersampul, setidaknya-tidaknya punya wajah, dan dirancang secara khusus.
- c) Media cetak itu dijilid atau sekurang-kurangnya memiliki jumlah halaman tertentu.
- d) Media cetak itu, harus berformat, atau saku, atau format konvensional sebagaimana format majalah yang kita kenal sekarang ini.<sup>13</sup>

Kategori majalah itu sendiri berdasarkan khalayak pembaca yang dituju dapat dibagi menjadi: majalah berita, majalah keluarga, majalah perempuan, majalah bisnis, majalah properti, majalah keuangan, majalah pria, majalah remaja perempuan, majalah remaja pria, majalah anak-anak, majalah ilmiah populer, majalah umum, majalah hukum, majalah pertanian, majalah olah raga, majalah berbahasa daerah, majalah militer, majalah komputer, majalah telepon seluler, majalah agama, dan majalah sastra.<sup>14</sup>

Majalah yang merupakan refleksi dari masyarakat dan zamannya, maka isi dari majalah itu tentu terikat oleh ikatan waktu atau jiwa zamannya karena tiap zaman memantulkan jiwa kesatuan sosial. Jadi gambaran tentang masyarakat atau zaman pada periode tertentu dapat kita lihat dengan hal-hal yang dibahas dalam suatu majalah pada periode tertentu pula.

Perubahan yang terjadi pada majalah perempuan yang terbit pada masa Orde Baru dan Reformasi tentu di pengaruhi oleh perubahan yang juga terjadi pada perempuan pada masa tersebut. Karena majalah tersebut membahas segala hal yang berhubungan dengan perempuan. Kemudian perubahan yang terjadi itu

---

<sup>13</sup> Ahmad Husein, *Pasang Surut Majalah*, Dua Mata, 15 Februari 2006 ([http:// dua mata.blogspot.com](http://dua.mata.blogspot.com))

<sup>14</sup> *Ibid* 11

tidak hanya bisa kita bahas dengan hanya melihat dulu dan sekarang. Tetapi perubahan itu harus kita lihat berdasarkan perubahan yang terjadi dalam konteks perubahan sosial.

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan merupakan, segala perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Tekanan pada defenisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan yang mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.

Perubahan sosial yang merupakan perubahan dalam struktur masyarakat tentu terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Maka hal ini akan mempengaruhi terjadinya perubahan peran yang dialami oleh perempuan. Maksud dari Peran itu sendiri adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.<sup>16</sup> Sehingga peran yang dilakukan perempuan akan terpengaruh oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan peran tersebut dapat kita lihat pada peran perempuan dalam ranah domestik dan publik. Maksud dari peran ranah domestik disini yaitu peran perempuan dalam lingkup keluarga. Kemudian maksud dari peran perempuan dalam ranah publik disini yaitu, bagaimana peran perempuan dalam lingkup

---

<sup>15</sup> Jacob, Rajab, *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro*, Bandung, Alfabeta, 2008, Hal 17

<sup>16</sup> Brunetta R, Wolfman, *Peran Kaum Wanita*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, Hal 10

umum atau di luar lingkup keluarga. Perubahan tersebut dapat kita lihat dari pengaruh perubahan yang terjadi dalam bidang sosial budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan hukum, serta trend berpakaian perempuan yang terjadi pada perempuan Indonesia dari masa Orde Baru sampai Reformasi.

Perubahan sosial budaya, dapat di lihat dari budaya patriarki yang selama ini di pakai pemerintahan Orde Baru sebagai ideologi Negara yang membuat perempuan di marginalkan perannya baik di ranah domestik maupun publik. Maka hal ini dapat di goyahkan oleh perempuan, dengan masukkan feminisme ke Indonesia pada tahun 1980. Kemudian mengalami perkembangan ke arah kesadaran gender pada tahun 1990-an karena perempuan menginginkan terwujudnya kesetaraan gender. Sehingga pada masa Reformasi merupakan tahap selanjutnya dari kesadaran gender yang telah terjadi pada tahun 1990-an. Maka perempuan terus mengalami perkembangan terhadap peran perempuan baik di ranah domestik maupun publik, karena pemerintah telah menjamin kesetaraan tersebut yang di cantumkan dalam GBHN.

Perubahan politik yang terjadi pada masa Orde baru dan Reformasi terhadap perempuan dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tersebut memberikan peran kepada perempuan. Masa Orde Baru perempuan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki sehingga tidak adanya kesetaraan gender. Karena pemerintah selalu mengendalikan perempuan dalam berbagai bidang. Sedangkan pada masa Reformasi pemerintah telah menjamin kebebasan gender antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam GBHN 1999 yang berisikan: Pemerintah dalam mengarahkan pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan dua

penekanan. Pertama, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.<sup>17</sup>

Makna dari konsep gender itu sendiri yaitu, konsep yang membedakan manusia atas perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial dan budaya. Karena gender dilihat dari segi sosial dan budaya maka peranan gender timbul akibat perbedaan persepsi masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki.

Hal ini berarti bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki tidak hanya dilihat dari segi biologis tetapi juga peran yang dibuat dan ditentukan oleh masyarakat atas dasar budaya, norma, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>18</sup> Masyarakat Indonesia yang pada umumnya menganut sistem patriakhal, maka dengan adanya gender ini akan mempermudah terbentuknya ideologi patriakhi di Indonesia. Sehingga terjadilah ketidak setaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Perubahan yang terjadi pada perempuan tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga mengalami peningkatan dalam bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, hukum dan lainnya.

---

<sup>17</sup> Siti Musdah M, *Perempuan dan Politik*, Jakarta, PT Gramedia Utama, Hal 101-102

<sup>18</sup> Atmazaki, *Dinamika Jender Dalam Konteks Adat dan Agama*, Padang , UNP Press, 2007, Hal

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode analisis isi. Tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai peran perempuan dalam rubrik profil majalah *Femina* pada masa Orde Baru dan Reformasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, mencari dan mengumpulkan data berupa majalah, buku-buku atau tulisan-tulisan relevan dengan kajian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan berupa buku-buku dan artikel majalah maupun koran untuk memperoleh data penelitian yang membatasi kegiatan pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa riset lapangan. Lebih jauh dari penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data tertulis, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>19</sup> Data-data ini diperoleh dari perpustakaan Nasional, perpustakaan UNP, perpustakaan Jurusan Sejarah, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Pustaka Daerah.

Pengumpulan data ini memiliki empat langkah penelitian yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama adalah menyiapkan alat-alat dan perlengkapan penelitian, yaitu alat tulis untuk mencatat ringkasan dari buku dan majalah yang dibaca, kedua adalah menyusun langkah kerja yaitu catatan tentang bahan penelitian atau sumber utama dengan menandainya pada buku catatan. Langkah

---

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, Hal 1-3

ketiga dan keempat adalah pengaturan waktu penelitian dan membaca serta membuat catatan.

Kedua, tahap analisis dan interpretasi yaitu karya-karya yang diteliti tersebut diuraikan dan diterangkan berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, tanpa membandingkan-bandingkan sumber dalam konteks benar atau salah. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran.

Ketiga, penyusunan dan penyajian data-data yang telah ditemukan tadi dalam bentuk penulisan ilmiah (skripsi).

## **BAB II**

### **PEREMPUAN DALAM MEDIA MASSA**

#### **A. Gambaran Umum Perempuan Indonesia**

##### **a Masa Orde Baru**

Gambaran perempuan pada masa Orde Baru dapat kita lihat dengan peralihan kekuasaan pada masa Orde Lama ke Orde Baru. Karena masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru ini, merupakan titik awal bagaimana pemerintahan Orde Baru memberikan peran kepada perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik.

Masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru merupakan saat yang sulit bagi peran perempuan dalam ranah publik. Karena organisasi perempuan dianggap sebagai salah satu elemen yang harus diawasi dan di pasung atas nama kepentingan Negara. Salah satu contoh nyata adalah gerakan penghancuran ke akar-akarnya yang dilakukan terhadap Gerwani pada tahun 1965. Penghancuran ini dilakukan dengan cara politik pencitraan hingga di tingkat daerah dimana Gerwani dicitrakan sebagai sekumpulan perempuan kejam.

Sehingga pada masa Orde Baru, organisasi perempuan disentralisasi Negara di bidang “keperempuan”. Perempuan berperan sebagai istri pendamping suami, pendidik anak dan pembina generasi muda, serta pengatur ekonomi rumah tangga. Kalaupun ada perempuan yang bekerja di luar rumah, hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan.

Selain itu, kiprah perempuan di luar rumah juga difokuskan pada aktivitas sosial dan penyumbang tenaga pada masyarakat. Hal ini, tentu saja semakin melanggengkan budaya patriaki.

Salah satu organisasi yang terkenal pada masa itu adalah Dharma Wanita yang berdiri pada tahun 1974 dan dikenal sebagai organisasi istri pegawai negeri. Organisasi ini juga dikenal dengan programnya yang disebut PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Demikian halnya dengan istri-istri ABRI juga tergabung dalam organisasi sesuai dengan bidang suaminya, antara lain Persit (Persatuan Istri Tentara) Candra Kirana bagi istri angkatan darat, Jalasenastri untuk istri angkatan laut, PIA Ardhya Garini bagi istri angkatan udara dan Bhayangkari untuk istri anggota Polri.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan organisasi perempuan bentukan Orba telah mereduksi peran perempuan sebatas tiga I (Istri, Ibu, dan Ibu rumah tangga). Tugas ini amat mulia, tetapi tanpa disadari telah menyebabkan tidak adanya tempat bagi perempuan sebagai “manusia merdeka yang dapat mengekspresikan pikirannya bagi kemajuan kaum perempuan dari sudut kepentingan perempuan.” Keadaan ini membuat berbagai persoalan kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan di masyarakat atau di luar lingkup keluarga praktis diabaikan.

Sebaliknya, organisasi perempuan pada saat itu memainkan peran subordinasi dan menyebarluaskan citra peran ideal perempuan dalam konteks tiga I tersebut, dalam konotasi “Kodrat”. Dengan “kodrat” ini perempuan ideal dicitrakan bersifat “lemah lembut, tidak berbicara dengan keras, tidak

---

<sup>20</sup> Luky Sndra Amalian, *Kiprah Perempuan Diranah Politik dari Masa ke Masa*, 30 Juni 20101, (<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/a>)

mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas urusan suami, serta menjadi istri yang penurut dan anak perempuan yang patuh. menjelaskan bahwa pada pemerintahan Orba praktis telah memobilisasi perempuan dengan kekuatan politik organisasi untuk tujuan politik tertentu. Orba telah memanfaatkan jaringan organisasi perempuan untuk mendominasi kaum perempuan (PKK, Dharma Wanita, dan lain-lain) untuk tunduk dan patuh pada negara yang pada waktu itu ada pada dominasi kekuatan tunggal partai politik.<sup>21</sup>

Walaupun pada awal kemunculannya difasilitasi oleh LSM, latar belakang utama berdirinya kelompok perempuan adalah adanya proses untuk menjawab kebutuhan pada tingkat makro dan mikro. Dalam konteks makro, peran perempuan secara umum dimarginalkan negara, baik dari sisi politik, ekonomi maupun budaya. Sebagai ilustrasinya adalah dikooptasinya organisasi-organisasi perempuan untuk mendukung Golkar di masa Orde Baru, dan dikembangkan sistem “Ibuisme” oleh negara dalam memperlakukan perempuan Indonesia. Dalam sistem tersebut, perempuan diperlakukan seperti Ibu yang berperan sekunder dan selalu menjadi penanggungjawab pendidikan anak, dan lain-lain.

Oleh karena itu, kemudian muncul program negara bagi perempuan seperti PKK, Panca Dharma Wanita, dan sebagainya. Bahkan dalam bahasa Sosiolog peran perempuan maupun keluarga dalam konteks itu tidak dihapuskan oleh negara, namun dijinakkan dan dimanfaatkan. Perempuan pada masa Orde Baru selalu dihubungkan dengan fertilitas dan mortalitas, terkait dengan kebijakan pembangunan saat itu, khususnya program keluarga berencana (KB).

---

<sup>21</sup> Saskia Wieringa, *Kuntilanak Wangi Organisasi perempuan Indonesia Sesudah 1950*, Jakarta, Kalyanamitra, 1998, Hal 36

Pemerintahan Orde Baru yang memanfaatkan ideologi patriarki yang sudah lama menjadi kebudayaan Indonesia. Patriarki yang merupakan sistem terstruktur dan prakter sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, malakukan opresi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini dalam dua bentuk, yakni, private patriarchy (patriaki domestik) yang melakukan kerja dalam rumah tangga sebagai strootip perempuan, dan publik patriarchy (patriaki publik) yang menstrootipkan laki-laki sebagai pekerja di sektor publik yang sarat dengan karakter keras penuh tantangan.

Kuatnya cengkraman patriaki ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marjinal dan sub ordinat dalam kerja maskulin, karena posisi itu di bentuk oleh ideologi patriaki yang meneguhkan perempuan menjadi domonsen dibidang sub ordinasi. Ideologi yang memandang perempuan sebagai “makhluk lemah” telah menjadi ideologi umum yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam, tetapi juga cara pandang kaum intelektual dalam melihat dan menempatkan kaum perempuan.<sup>22</sup>

Maka ideologi patriaki ini lah yang di dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru untuk memberikan peranan kepada perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Sehingga terjadilah ketidak setaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Gender yang merupakan suatu sifat yang melekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-lakidianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sehingga

---

<sup>22</sup> *Ibid* 20

bias gender ini telah menjadi persoalan sosial yang serius, karena dalam penerapannya telah melahirkan praktek-paktek ketidakadilan yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti: proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip dengan label negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosial ideologi nilai peran gender. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan itu sebenarnya saling mengikat dan tidak mungkin di pisahkan satu sama lain.<sup>23</sup> Sehingga pemerintah Orde Baru menempatkan peranan perempuan hanya untuk urusan ranah domestik. Walaupun ada di ranah publik itu hanya selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki untuk mendukung laki-laki di ranah publik, demi mendukung program pemerintah.

Perempuan dalam bidang pendidikan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Tetapi masih terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya laki-laki lah yang terlebih dulu mengenyam pendidikan dari pada perempuan. Kemudian di Negara kita laki-laki juga sudah mendapat pendidikan sekolah, jauh sebelum perempuan yang pertama kali diperkenankan masuk sekolah.

Tidak heran pada tahun 1971 hampir 50 dari 100 perempuan usia 10 tahun ke atas tidak dapat membaca-menulis atau buta huruf. Sementara dari 100 laki-laki pada kelompok usia yang sama hanya kurang dari 30 orang yang buta huruf. Dengan adanya usaha pemberantasan buta huruf yang berkesinambungan, maka pada tahun 1980, dari seperti kelompok perempuan di atas yang masih buta

---

<sup>23</sup> Fakih Mansour, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, Hal 32

huruf tinggal sekitar 37 orang, dan pada tahun 1997 tinggal 17 orang. Sebagian besar perempuan yang buta huruf tersebut adalah penduduk berusia tua yang merupakan produk sistem zaman dulu, yang seperti disebutkan di atas kurang memberi kesempatan bersekolah pada perempuan.<sup>24</sup>

Dalam bidang ekonomi masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam daftar nama 100 kolongmerat Indonesia terkemuka yang dimuat dalam majalah Eksekutif edisi Maret 1997, hanya ada 3 perempuan: Ny. H. Siti H. Rukmana (peringkat ke 37), dengan bidang usaha utama jalan tol dan keuangan, Ny Kartini Mulyadi (peringkat ke 73), dalam bidang farmasi, komestik dan properti. Susilowati Widjaja Ng (peringkat 75), di bidang keuangan, konstruksi dan properti. Mengapa hanya 3% padahal jumlah penduduk perempuan Indonesia lebih melebihi jumlah penduduk pria. Kemudian kurang leih 76 juta tenaga kerja Indonesia (statistik 1990) sekitar 32 juta di antaranya perempuan.<sup>25</sup>

Hal ini bisa terjadi karena selain konstelasi kekuasaan pria terhadap perempuan pada umumnya, tradisi dan nilai-nilai budaya, banyak menentukan. Belum lagi sikap kelompok-kelompok masyarakat: kelompok kota dan kelompok desa, kelompok didik dan kurang terdidik, kelompok bisnis dan non bisnis dan seterusnya. Dalam suatu gerakan yang bertujuan mengubah situasi sosial, apakah secara radikal ataupun secara evolusioner, sikap-sikap yang ada dalam masyarakat menjadi faktor penentu.

---

<sup>24</sup> Soedarti Surbakti, *Pendidikan Bagi Wanita: Masih Harus Diperjuangkan*, dalam Buku Menjurus Arus: Jakarta, PT Gaya Favotit Press, 1997, Hal 233

<sup>25</sup> Toeti Adhitama (Pemimpin Redaksi Eksekutif), *Wanita Pengusaha*, dalam Buku Menjurus Arus: Jakarta, PT Gaya Favorit Press, 1997, Hal 53

Sampai saat sekarang ini di Indonesia kaum perempuan belum mampu meningkatkan diri menjadi sederajat dengan kaum pria, situasi yang bukan hanya monopoli Indonesia, bukan berarti semua perempuan Indonesia selama ini bersikap pasif. Mungkin karena rasa hormatnya pada tradisi dan nilai-nilai budaya, mereka umumnya memilih mengutamakan peran sebagai ibu pengurus anak dan istri pendamping suami. Bahkan yang berpendidikan formal dan terjun ke lapangan kerja pun kebanyakan secara naluriah cenderung memilih pekerjaan-pekerjaan yang menjurus ke peran-peran tradisional itu, antara lain: guru, perawat, sekretaris, humas dan ahli kecantikan misalnya.

Meskipun terjadi ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. tapi tetap terjadi perkembangan perempuan dalam bidang-bidang ekonomi. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai tahun 1997, sebesar rata-rata 7% , kita menyaksikan pula terjadinya perubahan status perempuan yang mengembirakan. Perubahan paling pesat juga terjadi dalam bidang usaha.<sup>26</sup>

Perempuan dalam bidang hukum pada masa Orde Baru menunjukkan hukum yang bias gender. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang ada dalam pasal 31 dan pasal 34 UU Perkawinan. Pasal ini pada pokoknya membagi peran laki-laki dan perempuan dengan sangat tegas dan rigid, yaitu bahwa suami (laki-laki) adalah kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan istri (perempuan) adalah ibu dan pengurus rumah tangga. Ketentuan dalam pasal 31 dan 34 ini merupakan pengukuhan dari anggapan dan nilai yang selama ini dipercaya oleh masyarakat sebagai nilai-nilai yang tertinggi dan bahkan dianggap kodrat. Dengan kata lain,

---

<sup>26</sup> *Ibid* 23 Hal 55

ketentuan ini telah mengukuhkan nilai-nilai gender dan mengadopsinya menjadi ketentuan UU.<sup>27</sup>

Ketentuan ini, selain bias gender juga sangat bias kelas menengah serta bertentangan dengan kenyataan sosial. Dalam kenyataannya, kaum perempuan tidak lagi hanya sebagai pencari nafkah tapi juga banyak menjadi kepala keluarga. Akibatnya timbul ketegangan antara nilai-nilai dan peraturan hukum dan peraturan hukum yang ditetapkan dan kenyataan sosial yang terus berlangsung. Ketegangan ini telah melahirkan beban fisik dan psikologis yang tidak kecil pada perempuan dan menimbulkan konflik yang disebabkan tidak terpenuhinya harapan akan peran masing-masing setelah adanya perubahan peran perempuan tersebut. Kemudian ketegangan antara nilai dan kenyataan sosial yang terus berubah ini kerap kali juga menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Tak jarang pula perkawinan mereka berakhir dengan perceraian.

#### **a. Masa Reformasi**

Beralihnya masa Orde Baru ke Reformasi, juga telah memberi dampak yang besar terhadap perempuan. Karena pada masa ini kaum perempuan sudah berada di ranah publik, dan kiprah perempuan Indonesia telah menunjukkan kesetaraan dengan kaum laki-laki.

Maka keberadaan organisasi perempuan semakin mendapat tempat seiring dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Perjuangan aktivis perempuan untuk memperjuangkan hak kaum perempuan yang selama ini dipasung oleh kepentingan Negara semakin terbuka lebar.

---

<sup>27</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Perubahan yang Harus Diperjuangkan untuk Kaum Perempuan di Bidang Hukum*, dalam Buku menjurus Arus; Jakarta, PT Gaya Favorit Press, 1997, Hal 204

Organisasi perempuan terus bermunculan dalam berbagai bentuk *women crisis center dan hotline*. Tidak hanya itu, partai politik pun tidak ketinggalan memasukkan unsur perempuan ke dalam bidang organisasinya maupun sayap organisasi yang dipimpin langsung oleh perempuan. Misalnya, Partai Golkar memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Partai Pembangunan (PPP) memiliki Wanita Persatuan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan (DUPP), Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki Perempuan Pemberdayaan Amanat Nasional.

Keberpihakan terhadap kaum perempuan juga ditunjukkan dengan amandemen UUD 1945 dan memuat unsur kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga Negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintah. Bahkan, pada saat pembentukan draft amandemen UUD 1945, organisasi perempuan juga dilibatkan di bawah koordinasi Komite Perempuan untuk Perdamaian dan Demokrasi. Hal ini di perkuat dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46, tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislative, eksekutif, maupun yudikatif.<sup>28</sup>

Masa Reformasi yang mana dianggap sebagai tonggak redefinisi peran politik perempuan selama Orba dengan ciri munculnya kelompok-kelompok perempuan yang melakukan kegiatan atas dasar “empati” terhadap penderitaan perempuan. Di antara kegiatan tersebut adalah pendampingan untuk meningkatkan pendapatan perempuan miskin, pendampingan terhadap perempuan

---

<sup>28</sup> Luky Sandra Amaalia, *Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa*, LIPI, 30 Juni 2010 (<http://www.politik.lipi.go.id>)

korban kekerasan seksual, pendidikan politik dan advokasi hak-hak perempuan, peningkatan kesadaran gender, serta upaya-upaya menjembatani terwujudnya rekonsiliasi nasional atas dasar kemanusiaan. Puncak dari gerakan perempuan era ini adalah terbentuknya Komnas Perempuan. Komnas Perempuan merupakan lembaga kuasa negara yang dibentuk sebagai respon atas tekanan publik baik domestik maupun internasional. Tujuannya agar pemerintah mempunyai komitmen lebih kuat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasca kerusuhan Mei 1998.

Keikutsertaan perempuan aktif di ranah publik juga di dasari oleh *motherhood*. Apalagi pada masa ini pemerintah telah menjamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Maka sifat *motherhood* yang ada dalam diri perempuan dapat dikembangkan ke ranah publik. *Motherhood* itu sendiri merupakan pengorbanan seorang ibu tidak hanya dimonopoli untuk anak-anaknya saja, akan tetapi juga berkembang sebagai kebutuhan *self actualization* seorang ibu untuk mengekspresikan semangat altruismenya (berupa pengorbanan-pengorbanan) yang tidak hanya kepada anak dan keluarga tetapi juga kepada orang lain dan masyarakat.<sup>29</sup>

Berkembangnya semangat berkorban kaum ibu keluar dari rumah (wilayah privat) ke lingkaran sosial yang lebih besar, seperti komunitas (wilayah publik) merupakan salah satu indikasi langsung dari *motherhood* yang semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada cakupan mikro, melainkan mengembang pada konteks yang lebih makro. Pada dasarnya, pengorbanan-pengorbanan yang

---

<sup>29</sup> Raisalwan Abdy Lubis, *Filantropi Para Ibu Motherhood Sebagai Lndasan Kedermawanan Sosial Perempuan di Suara Ibu Peduli*, Jakarta, Primadia, 2008, 6-7

diberikan oleh kaum ibu, baik itu kepada anak dan keluarganya, atau kepada lingkungan sosialnya yang lebih luas, tidak lebih dari kerangka tindakan-tindakan altruistik, yakni ingin memberikan sesuatu kepada orang lain agar mereka menjadi lebih baik.

Hal ini membuat perempuan banyak ikut aktif di LSM dan mendirikan berbagai macam organisasi untuk mendukung dan menyelesaikan berbagai masalah yang di alami oleh perempuan Indonesia. Kemudian mereka juga banyak aktif dalam perpolitikan. Sehingga kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif karena hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif ( DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis. Kesempatan ini jelas adalah peluang emas, setelah sekian lama perempuan ada dalam bayang-bayang superioritas politik dikotomi perempuan *versus* laki-laki.<sup>30</sup>

Keterwakilan perempuan di bidang politik juga sangat diperlukan untuk mempengaruhi proses demokrasi dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Seperti yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu pasal 20 UU No 2 tahun 2008: “ kepengurusan Partai politik tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.” (Anugrah, 2008) Dengan adanya

---

<sup>30</sup> Ramadhani, *Pengaruh Kebijakan Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Pemerintahan*, Universitas Sumatera Utara, 2010 (<http://repository.usu.ac.id>)

undang-undang tersebut tidak diperkenankan suatu partai politik menyimpang dari system kuota 30 % dengan alasan apapun, oleh sebab itu partai politik hendaknya mampu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan, dan memajukan kaum perempuan. Dengan begitu, suatu partai politik tidak tersandung dan jatuh atau tidak mampu berkompetisi dengan Parpol lainnya.

Meskipun perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pemimpin, masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih kental dengan budaya patriarkhi masih sulit untuk menerima pemimpin perempuan. Selain karena alasan lemahnya kepemimpinan mereka, perempuan juga dinilai kurang mempunyai kemampuan. Ini bisa dilihat tingkat keseriusan partai dalam menempatkan caleg perempuan, walaupun ada perempuan yang mereka usung dalam pemilihan legislatif, tidak sedikit di antaranya artis perempuan, figure terkenal, atau bahkan hanya karena perempuan itu salah satu kerabat terdekat pengurus partai. Ironisnya, pada banyak kasus, nama-nama caleg perempuan tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan partai untuk menuju pemilu 2009. ( Yas mashfiyah, 2009 ).<sup>31</sup>

Hal ini jga sependapat dengan Pengalaman Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfah (Kompas, 27 September 2004) menunjukkan bahwa meskipun gerakan perempuan telah berhasil membuat isu perempuan menjadi isu utama, misalnya dengan memasukkan tindakan khusus sementara bagi perempuan sebagai calon anggota legislatif di dalam undang-Undang pemilu 2003 serta menggolkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan

---

<sup>31</sup> *Ibid* 30

dalam Rumah Tangga, ternyata di lapangan masih menjumpai banyak kendala. Hal ini karena belum ada upaya untuk melakukan gerakan secara simultan dari tingkat pengambilan kebijakan dan di tingkat komunitas.

Perjuangan perempuan masih menemukan jalan berliku karena hingga saat ini dunia politik masih kental dengan budaya maskulin, dengan demikian, perjuangan perempuan dalam upaya menegakkan kesetaraan gender masih jauh dari harapan. Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan dari periode ke periode belum mampu mengentaskan kaumnya dari ketidaksetaraan gender yang dialami.

Oleh karena itu perjuangan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat dilakukan perempuan sendiri, melainkan diperlukan kerjasama dengan entitas sosial lain yang memiliki kepekaan terhadap perempuan (gender sensitivity). Selain itu, perjuangan juga memerlukan upaya sistematis, terprogram dan berkesinambungan pada semua sisi pembangunan. Disamping itu, perjuangan tersebut juga memerlukan komitmen bersama dari para pengambil keputusan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, kaum cendekiawan, beserta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengeliminasi berbagai kendala kultural, struktural dan instrumental dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di semua lini kehidupan.<sup>32</sup>

Pada masa reformasi perempuan terus mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari data UNICEF tentang pendidikan di Indonesia yang menyatakan., pemerintah Indonesia sejak kemerdekaannya

---

<sup>32</sup> *Ibid* 28

tahun 1945 terus mengembangkan sistem pendidikannya dan wajib belajar 9 tahun dicanangkan sebagai kebijakan nasional pada tahun 1994 membuat terus berkembangnya pendidikan di Indonesia sampai saat sekarang.

Hampir semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, masuk sekolah dasar (SD), dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 93 persen pada tahun 2002, dan belum terlihat jelas ada kesenjangan gender. Tingkat sekolah lanjutan pertama (SLTP), APM turun menjadi 61,6 persen, dan rasio untuk anak perempuan sedikit lebih tinggi (62,4 persen) daripada untuk anak laki-laki (60,9 persen).

Anak yang tinggal di daerah perkotaan (71,9 persen) lebih banyak yang belajar di SLTP dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pedesaan (54,1 persen). Jika dilihat dari pendapatan keluarga, jumlah anak bersekolah dari tiap kelompok keluarga terpaut jauh. Penduduk dengan pendapatan rendah yang jumlahnya 20 persen dari seluruh penduduk memiliki APM yang jauh lebih rendah (49,9 persen) dibandingkan dengan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (72,2 persen).

Data Departemen Pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang signifikan antara jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang putus sekolah di tingkat SD maupun SLTP. Tiga kemungkinan anak perempuan untuk putus sekolah lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Di SD, dari 10 anak yang putus sekolah, 6 di antaranya anak perempuan dan 4 lainnya anak laki-laki. Demikian halnya di SLTP. Kesenjangan gender antara murid laki-laki dan perempuan yang putus sekolah sedikit lebih tinggi di sekolah lanjutan atas, yaitu 7

anak perempuan dibandingkan 3 anak laki-laki (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Sekitar 1.8 juta anak SD berusia 7-12 tahun, dan 4,8 juta anak berusia 13-15 tahun, tidak bersekolah (SUSENAS, 2002). Data dari angka pindah sekolah bisa dilihat bahwa anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berpeluang meneruskan pendidikan mereka dari SD ke SLTP. Jumlah anak laki-laki yang melanjutkan dari SD ke SLTP (83 persen) sedikit lebih tinggi meskipun tidak mencolok dibandingkan anak perempuan (81 persen). Perbedaan jumlah anak laki-laki dan perempuan yang meneruskan pendidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu dari SLTP ke sekolah menengah umum (SMU), sedikit lebih besar. Walaupun tetap tidak signifikan (73 persen untuk anak laki-laki dan 69 persen untuk anak perempuan).

Jumlah mereka di kelompok usia 15-24 tahun yang bisa baca tulis masih tetap tinggi: 96,6 persen pada tahun 1992 dan 98,8 persen pada tahun 2002. perbedaan angka pria dan perempuan yang bisa membaca dan menulis seperti yang terlihat dalam indeks kesetaraan gender (gender parity index) sebesar 97.9 persen pada tahun 1992 dan 99,8 persen pada tahun 2002.<sup>33</sup>

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pendidikan bagi perempuan Indonesia terus mengalami perkembangan. Walaupun masih adanya kesenjangan jumlah perempuan yang menempuh pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan terus mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi. Karena perempuan dan ekonomi, merupakan perpaduan artistik yang mewarnai

---

<sup>33</sup> Fakta Pendidikan Untuk Anak Perempuan Indonesia dari UNICEF, 22 September 2010 (<http://www.papantulisku.com>)

kehidupan bangsa Indonesia. Perempuan Indonesia, dengan segala potensi dan kreatifitasnya semenjak tahun 1997, telah membangkitkan geliat ekonomi bangsa Indonesia yang hampir terperosok ke dalam krisis yang mencekik masa depan bangsa. Usaha mikro yang dikelola perempuan telah terbukti mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 1997 dan 2008. Secara de facto perempuan di sektor informal ikut menyumbangkan pendapatan kotor nasional (GDP 55,6). Dalam aktivitas informal usaha mikro terdapat 51,21 juta unit pengusaha mikro, kecil dan menengah, 60 persen diantaranya dimiliki/dikelola perempuan. Usaha mikro tersebut mampu menyediakan kesempatan kerja 91,8 juta orang (97,33%) (Data UMKM, 2009)

Begitu juga dalam bidang hukum ikut mengalami perubahan. Karena adanya hukum yang berperspektif gender yang tercantum dalam GBHN (Tap No.IV/MPR1999) 1999-2004 yang berbunyi menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Kemudian Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2009 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional tanggal 19 Desember 2000.

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dengan ketentuan-ketentuan yang memperlihatkan azas-azas non diskriminasi dan lebih menyetarakan gender seperti: Pasal 27 (1) Azas non diskriminasi, Pasal 28 C - Hak untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas hidup dan hak

mendapatkan pendidikan. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 D (3) - Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 G - Hak atas perlindungan pribadi keluarga. Hak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan. Hak jaminan sosial. Pasal 38 H - Hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan. Hak jaminan sosial. Pasal 38 I - Hak perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, hak perlindungan HAM.

Kemudian dalam UU hak asasi manusia NO. 39 Tahun 1999, mengatur hak-hak perempuan dalam pasal 45 sampai dengan 57. UU Pengadilan Hak Asasi Manusia No.26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat. Atas inisiatif DPR sudah terbentuk RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Sudah terbentuk Keputusan Presiden RI No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, dimana ditentukan bahwa trafficking perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap HAM.<sup>34</sup>

## **B. Gambaran Perempuan dalam Pers Indonesia**

Pemerintah Orde Baru dan Reformasi yang telah memberikan pandangan yang berbeda pada perempuan Indonesia seperti yang telah di jelaskan di atas.

---

<sup>34</sup> Erna Sofyan Sukrie, SH, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, ([http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pemberdayaan\\_perempuan](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pemberdayaan_perempuan))

Tentu pers sebagai media juga memberikan gambaran yang berbeda terhadap perempuan pada dua masa pemerintahan ini.

Menurut May Lan, penulis buku “Pers, Negara dan Perempuan”, penggambaran perempuan dalam media pada masa Orde Baru masih berkutat lima hal yang memposisikan perempuan menduduki posisi asimetris dibanding laki-laki. Pertama, materi berita dalam surat kabar dan media massa masih menampilkan perempuan sebagai objek eksploitasi. Kedua, perempuan masih digambarkan sebagai sosok yang terbelakang, tertindas dan tidak memiliki otoritas dalam dirinya. Ketiga, pemberitaan tentang perempuan masih sangat bersifat monumental, seperti perayaan hari Ibu dan hari Kartini. Keempat, porsi pemberitaan tentang perempuan yang menyangkut pemberdayaan masih sangat minim.<sup>35</sup>

Hasil penelitian May Lan (2002:38) terhadap surat kabar Kompas dan Jawapos adalah sebagai berikut: bahwa dalam rentang waktu selama dua tahun (Juli 1996 sampai juni 1998) frekuensi berita tentang perempuan dalam dimensi ekonomi di surat kabar Kompas sebar 3,7% (99 dari 2.677 buah berita), dan Jawapos sebesar 7,8% (494 dari 6.331 buah berita). Sementara kiprah perempuan dalam dimensi politik yang menjadi berita Kompas 12,1% (324 dari 2.667 buah berita) dan di Jawapos 10,4% (661 dari 2.667 buah berita) dan di Jawapos 49,9% dimensi budaya di Kompas 43,3% dan Jawapos 31,9%.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Weny Arindawati, *Identitas dan Politik Representasi Media: Pemberitaan Buruh Migran Perempuan*, 21 Juli 2010 (<http://media.kompasiana.com>)

<sup>36</sup> Hamid Arifin, *Representasi Perempuan Dalam Pers*, dalam *Jurnal Komunikasi Massa* Vol 1. No.1. Juli 2007, Hal, 10

Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Suratmo (dalam Kompas 21 April 1998) terhadap sepuluh penerbit pers wanita di Indonesia, yakni Dewi, Rias, Mahkota, Kartini, Femina, Famili, Sarinah, Pertiwi, Nova dan Wanita Indonesia, menunjukkan bahwa dilihat dari perannya, peran perempuan dalam keluarga lebih menonjol (23,32%). Peran perempuan dalam keluarga itu meliputi: persoalan kecantikan, hubungan suami isteri, pengaturan rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan dan kekerabatan. Peran perempuan di luar rumah keluarga, persoalan pekerjaan lebih menonjol dibandingkan dengan peran dalam kegiatan sosial.<sup>37</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashadi terhadap sepuluh majalah dan tabloid perempuan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa: media wanita itu lebih mengulas perempuan dalam lingkup domestik atau berdimensi pribadi, seperti kecantikan dan hubungan suami istri. Rendahnya reportase yang berkaitan dengan domain politik yang keras, seperti ekonomi dan politik, menunjukkan bahwa media wanita tersebut belum menjadikan dirinya secara maksimal dalam struktur sosial.<sup>38</sup>

Hasil penelitian di atas bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa sebenarnya kesadaran gender dikalangan pekerjaan pers baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri masih rendah, sehingga berakibat pada munculnya berita-berita yang belum menunjukkan sensitifitas mereka terhadap upaya mendudukan perempuan pada harkat dan martabat yang sejati.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Ashadi Siregar, *Analisa dengan Perspektif Gender Atas Majalah Wanita di Indonesia*, Yogyakarta, 1991, Hal 37

Menurut May Lan (2002:11), praktek jurnalisme gender yang selama ini terjadi munculnya dalam dua wujud, yakni: lewat bias berita yang disajikan, dan masih minimnya perempuan sebagai pekerja pers. Menurutnya, dalam catatan PWI pada tahun 2002 ketika penelitiannya dilakukan, hanya ada 461 wartawan perempuan, sementara jumlah wartawan laki-laki ada 4.687 orang. Belum lagi ditambah dengan sederetan laki-laki yang duduk di staf redaksi, yang jumlahnya dapat di pastikan jumlahnya melebihi jumlah perempuan yang memiliki kesempatan untuk di jajarkan yang sama.

Munculnya permasalahan orintasi jurnalisme yang masih bias gender, menurut May Lan (2002:10-11) di sebabkan oleh dua hal, yakni:

- a. Mungkin karena ideologi besar yang menafikan kesetaraan masih memasung sikap dan pemikiran para pekerja pers yang notabene masih di dominasi oleh kaum laki-laki, sehingga merekapun terlena dan menikmati hegemoni kekuasaan.
- b. Kemungkinan kekurangan tahuan (*uwell informed*) para pekerja pers terhadap isu gender yang sesungguhnya adalah konstruksi sosial budaya, sehingga harus dipilah dengan kodrat.<sup>39</sup>

Memang ideologi gender merupakan alat yang sangat ampuh bagi suatu golongan yang kuat untuk melakukan hegemoni atas golongan yang lain yang lebih lemah. Demikianpun dengan ideologi gender yang berlaku dalam masyarakat bersistem patriakal seperti Indonesia. Ia merupakan alat yang sangat legitimate

---

<sup>39</sup> *Op.cit (italic)*

untuk mempertahankan relasi asimetris (tidak sepadan) antar laki-laki dan perempuan.

Manifestasi ketidakadilan gender baik dalam bentuk marginalisasi perempuan, subordinasi, kekerasan, stereotipe maupun beban kerja ini terjadi diberbagai tingkatan, yakni tingkat Negara, ditingkat organisasi, ditingkat adat istiadat, dilingkungan keluarga dan yang paling serius adalah di tingkat ideologi umum yang telah mengakar sebagai suatu keyakinan baik dalam diri laki-laki maupun perempuan itu sendiri.

Fenomena di atas membawa konsekuensi ketika akan dilakukan mengenai posisi dan peran perempuan di media, sebab bagaimanapun media itu tidak hidup dalam situasi bebas nilai terhadap lingkungan sosialnya. Artinya bahwa suatu media pasti memiliki orientasi nilai keyakinan, kesadaran kultural, profesionalitas dan keberpihakan. Diakui atau tidak, ideologi gender yang munculnya secara dominan dalam masyarakat di atas, mengakibatkan adanya fenomena di mana status peran dan kedudukan perempuan menjadi tidak pernah mengalami kemajuan yang berarti. Akibat lebih jauh adalah, mahalnnya penghargaan dari masyarakat, pers dan pemerintah terhadap prestasi dan perjuangan perempuan.

Hetty Siregar (2001:73) menuliskan bagaimana media menyajikan deskripsi atau gambaran tentang perempuan, yakni,

1. Kebanyakan menyangkut soal busana, makanan kegemaran, dan urusan rumah tangga pada umumnya. Bila seorang perempuan tidak berhasil membina rumah tangga, maka ia adalah makhluk yang gagal.

2. Mengukit soal kiat menyenangkan laki-laki baik dari cara berperilaku atau berpakaian.
3. Iklan di media massa memperlakukan perempuan sebagai simbol seksis.
4. Perempuan secara tradisional digambarkan sebagai dekorasi atau model untuk memprindah halaman media.<sup>40</sup>

Maka dari penjelasan di atas terlihatlah bahwa gambaran perempuan dalam pers pada masa Orde Baru sampai Reformasi tidak terjadi suatu perubahan yang signifikan. Karena masih adanya pers yang bias gender. Walaupun pada masa Reformasi pemerintah telah menjamin kebebasan pers, Sehingga dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk mengekspresikan masalah-masalah perempuan dan mencari solusinya melalui pers. Tetapi tetap saja terjadinya pers yang bias gender. Karena perempuan tidak memanfaatkan sebaik-baiknya pers sebagai salah satu bentuk gerakan perubahan dalam hal menyuarakan suara-suara perempuan yang belum terpenuhi haknya.

---

<sup>40</sup> Hesti Siregar, *Menuju Dunia Baru: Komunikasi, Media dan Gender*, Jakarta, 2001, PT BPK Gunung Mulia, Hal73

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Gambaran perempuan dalam rubrik profil majalah *Femina* pada masa Orde Baru dan Reformasi. Tergambarlah bahwa pada perempuan kelas menengah atas terjadi perubahan peran dalam kehidupannya. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi pada perempuan kelas menengah atas Indonesia, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan peran perempuan kelas menengah atas Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi yang termuat dalam rubrik profil *Femina*.

Rubrik profil *Femina* periode 1970-an menggambarkan peran perempuan dalam ranah domestik seperti menjadi iburumah tangga merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Setiap perempuan yang telah berkeluarga maka prioritas utamanya adalah sebagai “ibu rumah tangga” dengan berbagaimacam aktivitas seperti mengasuh anak, sehingga sebesar (55%) dalam pola pengasuhan anak menceritakan tanggung jawab seorang istri.

Hal ini berbeda di periode berikutnya, yaitu periode 1980-an karena *Femina* lebih banyak membahas tentang hubungan saling antara suami dan istri dalam hal pengasuhan anak yang terus mengalami peningkatan di periode-periode berikutnya, yaitu sebesar (82%), (90%), dan (100%).

Gambaran perempuan kelas menengah atas dalam rubrik profil terus mengalami perkembangan dalam mengangkat profil perempuan di bidang ekonomi dari periode 1970-an sampai 2000-an. Hal ini terlihat dari setiap periode terus bertambahnya menceritakan tentang perempuan yang sukses sebagai perempuan karier. Baik sebagai PNS dan Wirausaha, dengan peningkatan persentase sebagai berikut: periode 1970-an (45%), periode 1980-an (82%), periode 1990-an (90%) dan periode (100%), maka dalam rubrik profil *Femina* tergambarlah bahwa cenderung mengangkat tentang perempuan karier yang terus meningkat jumlahnya dari periode ke periode.

Profil perempuan kelas menengah atas di bidang politik dalam penulisan rubrik profil juga mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah persentase perempuan yang aktif dalam politik dari periode ke periode, yaitu: periode 1970-an (7%), periode 1980-an dan 1990-an (10%) dan periode 2000-an(15%).

Begitu juga dalam bidang pendidikan, rubrik profil *Femina* dari periode 1970-an sampai 2000-an, menggambarkan perempuan kelas menengah atas yang terus mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah persentase perempuan kelas menengah atas yang lulusan dari berbagai macam Perguruan Tinggi. Baik dalam maupu luar negeri. Peningkatan persentase tersebut adalah, periode 19070-an (45%), periode 1980-an (60%), periode (92%) dan periode 2000-an (98%). Gambaran perempuan yang ditulis dalam rubik profil juga mengalami peningkatan dalam penulisan terutama gambaran perempuan yang aktif dalam organisasi yang bukan merupakan

bentukan pemerintah, yaitu; periode 1970-an (10%), periode 1980-an (35%), periode 1990-an (50%) dan periode 2000-an (65%).

Serta gambaran perempuan dalam trend berpakaian memiliki jumlah persentase yang berbeda dari periode ke periode, yaitu: periode 1970-an lebih cenderung sebesar (26%) menggambarkan perempuan berpakaian kebaya dan batik. Periode 1980-an dan 1990-an lebih cenderung sebesar (80%) dan (87%) menggambarkan perempuan berpakaian blus/blazer. Kemudian periode 2000-an lebih cenderung sebesar (83%) menggambarkan perempuan dengan berpakaian blus/blazer yang elegan dan modis. Serta di akhir tahun 2009 sampai 2010 kembali menggambarkan trend mode pakaian batik sebesar (15%)

## **B. Saran**

Majalah *Femina* yang merupakan majalah perempuan yang paling populer di kalangan perempuan Indonesia. Bahkan masih eksis sampai sekarang, walaupun telah banyak munculnya pesaingnya. Maka dari itu dengan adanya kesetaraan yang di jamin oleh pemerintah pada masa ini. Seharusnya hal ini dapat di gunakan sebaik-baiknya oleh *Femina* untuk membahas tentang masalah-masalah yang sedang di hadapi oleh perempuan Indonesia dan mencari jalan keluarnya. Kemudian membela hak-hak perempuan yang terabaikan.

*Femina* sebagai majalah perempuan seharusnya tidak hanya membahas tentang perempuan kelas menengah atas. Tetapi alangkah baiknya juga membahas tentang perempuan-perempuan kelas bawah. Sehingga dengan demikian *Femina* dan perempuan kelas menengah atas lainnya mengetahui permasalahan yang di

hadapi oleh perempuan kelas bawah. Kemudian dengan begitu *Femina* dan perempuan kelas menengah atas dengan bekerjasama dapat mencari solusi dan membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh perempuan kelas bawah.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Gambaran Peran Perempuan Dalam Rubrik Profil Majalah Femina Pada Masa Orde Baru dan Reformasi". Skripsi ini ditulis dan disusun guna menyelesaikan studi dan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak memperoleh dan mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, masukan, serta dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Hendra Naldi, S.S, M. Hum selaku pembimbing I sekaligus sebagai Ketua Jurusan Sejarah, dan Bapak Eka Vidya Putra, S.Sos, M. Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Zul Asri, M. Hum selaku penasehat akademik
3. Bapak tim penguji yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum selaku sekretaris Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar dan karyawan/ti Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

6. Teristimewa untuk Orang Tua serta saudara-saudara sanak famili yang telah memberikan bantuan moril dan materil pada penulisan dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan seperjuangan program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, khususnya angkatan 2006 serta semua pihak yang telah membantu, memberikan dorongan dan motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan diterima serta mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II. PEREMPUAN DALAM MEDIA MASA</b>	
A. Gambaran Umum Perempuan Indonesia	
a. Masa Orde Baru.....	17
b. Masa Reformasi.....	24
B. Gambaran Perempuan dalam Pers Indonesia.....	33
<b>BAB III. GAMBARAN PEREMPUAN DALAM RUBRIK PROFIL MAJALAH <i>FEMINA</i></b>	
A. <i>Femina</i> Sebagai Agen Perubahan.....	39
B. Gambaran Peran Perempuan dalam Rubrik Profil pada masa Orde Baru dan Reformasi (1972-2010)	
a. Perempuan dan keluarga: Pola pengasuhan anak.....	47
b. Perempuan dan ekonomi: Antara penunjang dan kebutuhan pengembangan ekspresi diri.....	49
c. Perempuan dan politik: Kesetaraan peran yang dinanti-nanti.....	57
d. Perempuan dan pendidikan: Persoalan yang selalu menjadi perhatian.....	64
e. Perempuan dan organisasi: Wadah aspirasi perempuan.....	67
f. Perempuan dan trnd berpakaian: Menggambarkan kelas sosial.....	73
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LEMBAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel. 1 : Perubahan dan Peran Perempuan di Ranah Domestik dalam Rubrik Profil <i>Femina</i> pada Masa Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1970-an -2000-an.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel. 2: Perubahan dan Peran Perempuan di Bidang Ekonomi dalam Rubrik Profil <i>Femina</i> pada Masa Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1970-an -2000-an.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel. 3: Perubahan dan Peran Perempuan di Bidang Perpolitikan dalam Rubrik Profil <i>Femina</i> pada Masa Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1970-an -2000-an.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel. 4: Perubahan dan Peran Perempuan di Bidang Pendidikan dalam Rubrik Profil <i>Femina</i> pada Masa Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1970-an -2000-an.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel. 5: Perubahan dan Peran Perempuan di Bidang Organisasi dalam Rubrik Profil <i>Femina</i> pada Masa Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1970-an -2000-an.....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel. 6: Perubahan dan Peran Perempuan di Bidang Trend Berpakaian dalam Rubrik Profil <i>Femina</i> pada Masa Orde Baru dan Reformasi dari tahun 1970-an -2000-an.....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abizar. 1988. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: P2LPTK
- A. Muis. 2000. *Titian Jalan Demokrasi Peranan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*. Jakarta: Harian Kompas.
- Dewi, Anggraini. 1997. *Menuju Arus Seperempat Abad Femina*. Jakarta: PT Gaya Favorit Press
- Atmazaki. 2007. *Dinamika Jender Dalam Konteks Adat dan Agama*. Padang: UNP Press
- Ashadi, Siregar. 1991. *Analisa dengan Perspektif Gender Atas Majalah Wanita di Indonesia*, Yogyakarta
- Ermanto. 2005. *Wawasan Jurnalistik Praktis*. Yogyakarta: Cinta Pena
- I, Taufik. 1977. *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: P.T Triyinco
- Kurniawan, Junaedhi. 1995. *Rahasia Dapur Majalah Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Teguh, Meinenda. 1981. *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik*. Bandung: Armico.
- Siti, Musdah. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Ollenburger, Jane C. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pengurus PWI Pusat. 1991. *Wanita dan Pers*. Jakarta: Balai Pustaka
- Jacob, Ranjabar. 2008. *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro*: Bandung.  
Alfabeta
- Wolfman, R. Brunetta. 1988. *Peran Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius
- Saskia, Wierenga. 1998. *Kuntulanak Wangi: Organisasi Perempuan Indonesia  
Sesudah Tahun 1950*. Jakarta: Kalyamitra
- Mestika, Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor  
Indonesia

## **MAJALAH**

Femina dari Tahun 1972 Sampai 2010

## **INTERNET**

Agus Rakasiwi, *Menengok Citra Perempuan dari Sampul Majalah*, 14 Januari 2010  
([kampuspr@yahoo.com](mailto:kampuspr@yahoo.com))

Hamid Arifin, *Representasi Perempuan Dalam Pers, Jurnal Komunikasi Masa*, 2007 (<http://fisisp.uns.ac.id/publikasi/sk> )

Martadi, *Citra Perempuan dalam Iklan Femina Edisi 1999*,  
(<http://puslit2.petro.ac.id/joernal/index.php>)

Ahmad Husein, *Pasang Surut Majalah*, Dua Mata, 15 Februari 2006  
([http:// dua mata.blogspot.com](http://dua.mata.blogspot.com))

Luky Sndra Amalian, *Kiprah Perempuan Diranah Politik dari Masa ke Masa*, 30 Juni 2010  
(<http://www.politik.lipi.go.id>)

Ramadhani, *Pengaruh Kebijakan Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Pemerintahan*, Universitas Sumatera Utara, 2010  
(<http://repository.usu.ac.id>)

Fakta Pendidikan *Untuk Anak Perempuan Indonesia dari UNICEF*, 22 September 2010  
(<http://www.papantulisku.com>)

Weny Arindawati, *Identitas dan Politik Representasi Media: Pemberitaan Buruh Migran Perempuan*, 21 Juli 2010  
(<http://media.kompasiana.com>)